

PERAN INSPEKTORAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

The Role Of The Inspectorate In Improving The Quality Of Local Government Financial Reports Pinrang District

Eka Maulana

Email : ekamaulana371@gmail.com

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Pinrang Regency Inspectorate in improving the quality of the financial reports of the Pinrang Regency Government. This research uses descriptive qualitative research using a qualitative approach. Data were obtained from interviews, observations, and documentation. The results show that the Pinrang Regency Inspectorate has played an important role in improving the quality of the financial reports of the Pinrang Regency Government which for seven consecutive years received an Unqualified Opinion by increasing its work in terms of implementing performance audit supervision, auditing certain objectives, reviewing regional financial reports, monitoring, and evaluation of supervision as well as improvements in terms of coaching or consulting to audits and the Work Units of Service Equipment within the Pinrang Regency Government.

Keywords: *The role of the inspectorate, Quality of Financial Reports*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Pinrang telah berperan penting dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang dimana selama tujuh tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan melakukan peningkatan kerja dalam hal pelaksanaan pengawasan audit kinerja, audit tujuan tertentu, review atas laporan keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi pengawasan serta peningkatan dalam hal pembinaan atau konsultasi kepada audit dan Satuan Kerja Perangkat Dinas dalam Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci : Peranan inspektorat, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Inspektorat daerah melaksanakan kegiatan audit guna mendukung fungsi pengawasan internal yang ada dalam pemerintahan daerah.

Peran dan Fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu : perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan



fasilitas pengawasan, dan pemeriksaan pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Kemudian, inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka menyakinkan kendala informasi yang disajikan.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pinrang sebagai unsur pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Pinrang yang menjalankan tugas-tugas pengawasan intern yaitu, audit kinerja, audit tujuan tertentu, review atas laporan keuangan daerah, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan intern lainnya. Menurut Standar dan pedoman yang telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 63 Tahun 2015.

Salah satu indikator untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan, Menurut UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung dan Jawab Keuangan Negara tertulis bahwa tujuan Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK adalah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kemudian Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian), TW (tidak wajar), TMP (tidak memberikan pendapat).

Peran pengawasan yang optimal turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih pada instansi pemerintah, terutama dalam mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat, JL. Gatot Subroto No.2, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Responden/Informan ialah pegawai Inspektorat bagian Irban, Kasubag evaluasi dan pelaporan, masing-masing 1 informan dan Pejabat fungsional auditor sebanyak 2 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survai yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek pemeriksaan. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, teknik ini digunakan jika peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dan Jenis dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi nontekstual dan dokumentasi pemerintah. Dokumentasi nontekstual yaitu dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar, contohnya peta, grafik, gambar, rekaman, dan lain-lain. Sedangkan dokumentasi pemerintahan yaitu dokumen terkait informasi ketatanegaraan suatu pemerintahan, contohnya undang-undang dan peraturan pemerintah.

Adapun jenis dan sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif, merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Menurut Sugiyono (2015:23) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan dari beberapa sumber yang berguna bagi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan pihak Inspektorat daerah dapat dijelaskan bahwa pengawasan inspektorat pada audit kinerja sudah menjalankan tugasnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang sudah berjalan dengan baik, yang



terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan sesuai dengan ketentuan standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hasil wawancara dari Informan pihak Inspektorat, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Inspektorat dalam pengawasan audit tujuan tertentu, dapat dilaksanakan apabila ada penyimpangan, ketidaksesuaian dan kekeliruan terhadap laporan keuangan daerah suatu instansi.

Hasil wawancara dengan informan dari pihak inspektorat terkait dengan pengawasan reviu atas laporan keuangan daerah dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan inspektorat dalam pengawasan review atas laporan keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dari hasil review dengan penelahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak inspektorat terkait dengan pengawasan pemantauan dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan pemantauan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan, mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, dan mendapatkan informasi kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Hal tersebut juga diperjelas dari informan pihak kasubag evaluasi dan pelaporan "Bahwa kegiatan evaluasi memang perlu dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan, untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan pencapaian target".

Berdasarkan penelitian maka dapat dijelaskan bahwa peran inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang telah berperan sangat penting, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan sesuai standar, rencana, norma dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Irban, Kasubag evaluasi dan pelaporan, auditor madya dan muda yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menganggap bahwa peran inspektorat kabupaten pinrang, sudah melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik dan memuaskan, sehingga memang wajar untuk mendapatkan WTP (Wajar tanpa pengecualian) dari hasil penilaian opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Diketahui sebelumnya Kabupaten Pinrang selama tujuh tahun berturut-turut konsisten dalam meraih opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dikeluarkan oleh opini BPK. Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan seperti pengawasan audit kinerja, yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, pengawasan audit tujuan tertentu, yaitu dilaksanakan apabila terdapat tindak kecurangan dan penyimpangan dalam audit, pengawasan review atas laporan keuangan daerah, dilaksanakan untuk penelahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, pengawasan pemantauan dilaksanakan untuk dapat memberikan informasi kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan evaluasi pengawasan dilaksanakan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata peran inspektorat kabupaten Pinrang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangatlah penting.

Adapun faktor pendukung yang dihadapi inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu adanya dukungan kuat dari pimpinan daerah, dan adanya pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan bagi para auditor, sehingga kompetensi SDM mendukung sedangkan faktor penghambat yang dihadapi inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu hal sebaliknya.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan maka saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Pinrang dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya dalam penilaian opini BPK setiap tahunnya.
2. Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian lanjutan yang membahas tentang upaya inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan pemerintah daerah sebagai bagian dari kelanjutan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Wulansari Dewi, Putu Kepramareni. 2014. *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum"*. Jurnal Riset Akuntansi.
- Ambaryati, Vransiska VD. 2016. *"Peranan Inspektorat Daerah Dalam Membantu Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Surakarta"*. Tesis, Unpublish
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan BPK No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Choirunisah, Fairiziah. 2008. *"Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan oleh Sistem Akuntansi Instansi"*. Semarang, Program Sarjana Universitas Diponegoro.
- Denis Dimas Permana, Emil Bachtiar. (2013). *"Analisis Peranan Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)"*. Jurnal Universitas Indonesia.
- Gamayuni, R.R. 2016. *"Efektifitas Fungsi Audit Internal: Faktor yang Mempengaruhi, dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survey Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di Pulau Jawa)"*. Simposium Nasional Akuntansi XIX.
- Marlaini, Aliamin, & M. Indriani. 2018. *"Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi kasus pada Salah Satu Inspektorat di Aceh)"*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 4, Nomor 1.
- Maleong, j, Lexy. 2006. *"Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya"*.
- Maria Damayanti. 2015. *"Pengaruh Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta)"*. Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Hafizh Ihsan. (2018). *"Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih"*. Skripsi, Unpublish.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 63 tahun 2015, tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.*



- Purwaniati Nugraheni, Imam Subaweh. 2011. *"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan"*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2019, tentang Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.*
- Rahmat, Sentot. 2010. *"Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi pada Kementerian Keuangan)"*. Tesis, Unpublish.
- Sari, Lusi N. 2014. *"Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci)"*. Skripsi, Unpublish.
- Sagung Inten Evicahyani, Nyoman Djinar Setiawina. 2016. *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan"*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2009. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta"*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Wutsqaa Imani Saputri. 2018. *"Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur)"*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yuswar Effendy. 2015. *"Kajian Hasil Pemeriksaan BPK Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"*. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis.